

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1987, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta.
- Farida, Maria, 1998, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Helaluddin & Wijaya, H., 2019, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar.
- Marbun, B.N, 2009, Kamus Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Mikhael, Lefri, et al., 2023, Hukum Pidana di Luar Kodifikasi, Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Press, Bandung.
- Panggabean, H.P., 2001, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Sinar Harapan, Jakarta.
- Partodiharjo, Subagyo, 2010, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Erlangga, Jakarta.
- Qamar, N., et al., 2017, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Cetakan Pertama, Social Politic Genius, Makassar.
- Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta.

Rifa'I, I.J., et al., 2023, Metodologi Penelitian Hukum, Sada Kurnia Pustaka, Banten.

Sasangka, Hari, 2003, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sujono, A.R., & Daniel, B., 2011, Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, & Puspitasari, Sri Hastuti, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Tim Ahli BNN, 2010, Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.

Widiarty, Wiwik Sri, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media, Yogyakarta.

## **B. Artikel Jurnal**

Cahyadi, Irwan Adi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia", *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 2, Mei 2014.

Erwinsyahbana, T. & Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis", *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.

Fadhil, Muhammad, "Analisis Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika kepada Penyalahguna Narkotika", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 7, No. 1, Juni 2024.

Fajarwati, Meirina, "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. , No. 2, Mei 2017.

Fasil, et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2023.

- Firmansyah D., & Dede, “Teknik Pengambilan Sampel, Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2022.
- Haris, Oheo K., “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.
- Iswahyuni, Ari, “Kedudukan Ancaman Pidana Minimal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.
- Nur, Adlia, & Anisa, “Identifikasi Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman)”, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 3, Oktober 2020.
- Muharrir, *et al.*, “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2023.
- Pakpahan, Hatarto, “Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Pengguna dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2014.
- Purba, *et al.*, “Penerapan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2022.
- Santoso, *et al.*, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Deposisi*, Vol. 1, No. 4, Desember 2023.
- S.M.S., Samuel, “Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam Pembuatan Putusan Pidana bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Hukum Hukmy*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2022.
- Tsani, I. F. N. & Ginting, R., “Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt)”, *Jurnal Recidive*, Vol. 10, No. 1, Januari-April 2021.

Wibowo. Ari, & Widiyasmoko, Ivan Agung, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum Undang*, Vol. 4, No. 2, November 2021.

### C. Hasil Penelitian / Tugas Akhir

Fitriyani, Desi, 2022, “Keabsahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Indonesia Judicial Research Society, 2022, “Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)”, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta.

Islami, Faisal “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2023”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Junaidillah, Yopi, 2016, “Makna Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pada Sertifikat Hak Tanggungan”, Skripsi, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018, “Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, BPHN, Jakarta.

Rustianingrum, Sri Muntari, 2016, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim atas Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus pada Tindak Pidana Narkotika”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Satriani, Icha, 2015, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Tresna, Widya, 2021, “Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika dalam Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Usman, Nursyamsi 2017, “Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 dalam Proses Peninjauan Kembali”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

#### D. Internet

Ali, “Paradigma Hakim Perkara Narkotika Belum Berubah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah-lt52136123848fc/?page=2>, diakses 28 Mei 2025.

Atiqah, Dewi “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan”, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses 16 Maret 2025.

Bachtiar, Muhammad Fatah, “Kekuatan Hukum Peraturan Desa dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa”, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/110058#:~:text=Abstract,a%20lanjutan%20pengesahan%20di%20Kemenkumham.>, diakses 11 Juni 2025

BNN, “Siaran Pers Tahun 2024: Penguatan Strategi dan Aksi Kolaborasi dalam P4GN”, <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPLETE-ALL.pdf>, diakses 25 Desember 2024.

Boim, “Satres Narkoba Magelang Kota Bongkar Peredaran Sabu, Pemuda 24 Tahun Ditangkap”, <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738654330/satres-narkoba-magelang-kota-bongkar-peredaran-sabu-pemuda-24-tahun-ditangkap>, diakses 1 Desember 2024.

Dzikriyah, Wajihatut “Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Bagi Pelaku Dewasa dalam UU Perlindungan Anak”, <https://pn-sumedang.go.id/penyimpangan-penjatuhan-pidana-minimum-bagi-pelaku-dewasa-dalam-uu-perlindungan-anak>, diakses 5 Februari 2025.

Hermansyah, “SEMA 10/2010 Diganti dengan PERMA 1/2014 Prosedur Bantuan Hukum di Pengadilan Dipermudah”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sema-102010-diganti-dengan-perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah-291>, diakses 21 Maret 2025

Humas BNN, “HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”, <https://bnn.go.id/hani-2024->

masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/, diakses 1 Desember 2024.

ICJR, “Problem Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius,” <https://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/>, diakses 1 Desember 2022.

Kejaksaan Tinggi Bali, “Pengarahan dari Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Terkait Teknis Penanganan Perkara Penting”, <https://keja-ti-bali.kejaksaan.go.id/berita/detail/1662>, diakses 25 Desember 2024.

Munawaroh, Nafiatul “Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>, diakses 21 Maret 2025.

Pemerintah Kota Magelang, “Bogeman dan Juritan Kota Magelang Dicanangkan Jadi Kampung Bebas Narkoba”, <https://magelangkota.go.id/view/bogeman-dan-juritan-kota-magelang-dicanangkan-jadi-kampung-bebas-narkoba>, diakses 1 Desember 2024.

Pramesti, Tri Jata Ayu, “Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0/>, diakses 28 Mei 2025.

Tindoo, Sri Yatni, “Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, [https://jdih.bolselkab.go.id/asset/hukum/Artikel\\_Sri\\_Yatni\\_Tindoo1.pdf](https://jdih.bolselkab.go.id/asset/hukum/Artikel_Sri_Yatni_Tindoo1.pdf), diakses 11 Juni 2025.

Zubaidah, St. “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)”, <https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuahputusan-memaknai-dissenting-opinion.html>, diakses tanggal 1 Februari 2025.

## E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

#### **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Trg perkara Tindak Pidana Narkotika terhadap Erik Syuhada, 22 September 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mre perkara Tindak Pidana Narkotika terhadap Candra Buana Putra, 26 Maret 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mgg perkara Tindak Pidana Narkotika terhadap Haikal Raynaldi, 4 Agustus 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Mgg perkara Tindak Pidana Narkotika terhadap Endah Susilowati, 15 Juni 2017.